

## DAFTAR REFERENSI

- Agung Rai, I Gusti. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ateh, M. Yusuf. 2016. *Akuntabilitas Kinerja: Orkestrasi Membangun Pemerintahan Yang Berorientasi Hasil*, <http://www.menpan.go.id/rbkunwas/artikel/artikel-rbkunwas/108-akuntabilitas-kinerja-orkestrasi-membangun-pemerintahan-yang-berorientasi-hasil> ; diakses tanggal 10 Januari 2017.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* Penerbit Andi, Yogyakarta
- Fahmi, Irfan. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri PAN Nomor PEW/20/M.PAN1111/2008 tahun 2008 tentang  
Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor  
53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja  
dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor  
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

